

PERANAN BUDAYA, BAHASA, DAN SASTRA DALAM MENUMBUHKAN TOLERANSI DAN SIKAP SALING MENGHORMATI

Maman S Mahayana

Universitas Indonesia

e-mail: maman_s_mahayana@yahoo.com

Abstrak: *Indonesian literature culturally is essentially 'ethnic' literature. The use of Indonesian language that places it as Indonesian literature, a national language derived from the Malay ethnic language. As a literature whose spirit is derived from ethnic culture, it can not be separated from the things that circle it. However, the creation of literary works does not come from emptiness. Not taken by angels from the sky. Literature was born from various socio-cultural problems, ideology, and so on which became anxiety writers. Indonesian literature is culturally an 'ethnic' literature so the study of it, directly or indirectly, can be used as an entry point to introduce the wealth of other ethnic cultures. Thus, literary learning in schools should no longer be treated as theoretical knowledge, but as a form of appreciation of the literary treasures of Indonesia itself and all as an effort to introduce ethnic culture with various phenomenon.*

Kata Kunci: *Culture, Language, Literature, Indonesia, Tolerance and Mutual Respect*



PENDAHULUAN

Riwayat pembentukan bangsa Indonesia adalah kisah panjang tentang sebuah komunitas yang inklusif. Bangsa yang terbuka menerima segala pengaruh (apa pun yang baik) yang datang dari mana pun. Tanpa mesti meninggalkan apa yang sudah menjadi miliknya, ia baik-baik saja menerima dan menyikapi segala pengaruh luar yang menyelinap, nongkrong atau berseliweran di depan mata. Tak ada resistensi ketika pengaruh luar itu datang dengan semangat menyebarkan persaudaraan, tanpa paksaan atau peperangan. Sikap seperti itulah sebenarnya yang menciptakan tali persatuan pada keberagaman penduduk di wilayah Nusantara ini.

Mengingat sejak awalnya bangsa ini inklusif, ia senantiasa menjadi tuan rumah yang baik: kepada siapa pun *well come*, silakan, prasangkanya baik, riang gembira, dan *positive thinking!* Dengan karakteristik yang demikian, bangsa ini, tanpa disadarinya, berkembang menjadi sebuah komunitas yang terbentuk lewat proses hibridisasi yang besar, luwes, lincah, lentur, mudah beradaptasi, dan penuh daya kreatif. Apa pun yang datang dan diterima, tiba-tiba disesuaikan dengan keadaan alam, dinamika kultural, dan kondisi sosial di sekitar. Segalanya, lewat kreativitas, diolahnya kembali, diubahsuaikan, dan dinusantarakan! Itulah karakteristik sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Nusantara ini: bangsa Indonesia! Ia terus bergerak dalam proses menjadi. Meskipun begitu, sebagai bangsa yang tidak dapat menghindar dari konsep negara, ia berada di

bawah perlindungan politik negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara politik, NKRI silakan saja ditetapkan sebagai "harga mati". Artinya, segala yang berada di bawah naungan NKRI, tanpa terkecuali, adalah bagian inheren dari diri kita, saudara kita, kehidupan kita. Oleh karena itu, sesiapa pun hendaklah tidak mencoba-coba *ngapusi*, merampok, merampas, melukai, mencederai, dan seterusnya, sebab ia akan berurusan dengan kita selaku bangsa yang besar, yaitu warga bangsa yang berada di bawah naungan NKRI itu. Tetapi, sebagai bangsa yang sejak awalnya sudah terbiasa berkelindan dan tumbuh dengan segala kreativitasnya, NKRI adalah harga hidup. Begitulah Sutardji Calzoum Bachri membuka wacana tentang bangsa yang berkembang lantaran kehidupan kreativitas di Tanah Air ini tidak tumbuh stagnan, mandek, dan juga tidak mundur terus pantang maju. Sutardji memberi penyadaran pada kita dengan membuka ruang kreatif seluasnya. Maka NKRI, tak dapat lain: sebagai harga hidup!

Apa benar begitu? Mari kita periksa! Proses pembentukan kebudayaan di wilayah Nusantara ini sebenarnya berkaitan erat dengan sikap hidup masyarakatnya yang religius. Sistem kepercayaan adalah akar tunjangnya. Proses pembentukannya tentu tidak sekali jadi, tidak *ujug-ujug*; tidak juga, jadi, maka jadilah: Tidak! Juga tidak melalui *simsalabim adakadabra, prok-prok-prok!* lalu keluarlah burung merpati atau bunga! Di sana, ada kisah yang panjang.

Mula-mula, bangsa Indonesia yang dengan segala keberagamannya itu, merasa dipersatukan oleh kesamaan sejarah, bahasa, budaya, klaim wilayah, kesadaran kebangsaan, dan entah apalagi. Tidak sesiapa pun yang pantas merasa paling Indonesia. Fakta sosiologis memang begitu: identitas Indonesia terus bergerak, menggelinding, *membal*, menabrak pewatas identitas lain dengan segala karakteristik keindonesiaannya. Identitas Indonesia, sampai entah kapan pun, akan terus laju dalam proses menjadi (*becoming*).

Begini Stuart Hall,¹ coba merumuskannya: “Identitas merupakan sesuatu yang secara aktual terbentuk melalui proses tidak sadar meloncati waktu, bukan kondisi yang terberi begitu saja dalam kesadaran sejak lahir.” Identitas menyisakan ketidaklengkapan, selalu ia berada dalam proses menjadi, sedang dibentuk dan entah selesainya kapan, atau terus berproses dan tak pernah selesai. Jadi, di satu pihak, secara juridis, NKRI yang mewadahi identitas Indonesia, dan di pihak lain, manakala ia berurusan dengan perkara etnisitas yang melekat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari NKRI, secara sosio-kultural, ia bergerak dalam proses yang belum selesai.

Di dunia ini, bangsa-bangsa yang multikultur tidak terhindarkan, kerap menyimpan, potensi –dan sekaligus— problem keberbagaian etnisitas, kesukubangsaan, dan identitas kebangsaan. Jika problem laten itu gagal diselesaikan, maka dampaknya sangat serius. Kesepakatan para pemuda yang mewakili organisasi etnik kesukubangsaan dan kemudian menanggalkan fanatisme primordial dan egoisme kedaerahan lewat deklarasi Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, merupakan fase penting penyelesaian fondasi etnisitas, yang dikatakan Ben Anderson sebagai komunitas bayangan (*imagined community*).² Sebuah dasar untuk membangun pilar Indonesia yang multikultur. Jadi, sesungguhnya, Indonesia telah menyelesaikan problem kesukubangsaan sejak hampir seabad yang lalu, dan mereka memilih sebuah bahasa sebagai bahasa persatuan: “*menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.*”

Setiap individu etnik adalah khas dan unik. Seolah-olah, sudah nasibnya ia terlahir begitu dengan latar belakang suku bangsa, bahasa, budaya, agama,

dan seterusnya. *Take for granted*. Sudah sedemikian adanya. Jadi, terima sajalah, sebab setiap manusia pada awalnya memang begitu. Meski demikian, hendaklah jangan ada yang merasa lebih agung atau lebih luhur dibandingkan yang lain, atau sebaliknya. Tak perlu mengagungkan semangat primordial dengan sikap *chauvinistic* secara berlebihan. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya jika kita mengukur persoalan etnisitas, budaya, dan agama, berdasarkan kacamata yang kita miliki. Sudah dari *sononya* ia ditakdirkan dalam garis etnisitas,³ lalu tumbuh, bergerak, berproses, membentuk identitas baru, dan menjadi entah apa. Identitas keindonesiaan adalah proses yang belum selesai.

Begitulah perkara identitas. Ia tak dapat menghindari dari keunikan yang membedakannya dengan identitas lain, dan bersamaan dengan itu, melekat adanya persamaan. Jadi, sesungguhnya identitas menyimpan kesamaan di tengah perbedaan (*sameness amid difference*). Perbedaan itu, tidak perlu diprovokasi, sehingga memicu konflik. Sebab, setiap manusia pada hakikatnya juga berbeda. Fitrahnya memang begitu. Lalu, mengapa pula ada pemaksaan agar segalanya sama dan seragam? Bukankah kita, sang manusia, setiap individu, komunitas, suku bangsa, sejak awalnya sudah ditakdirkan berbeda? Lalu, para pendiri bangsa ini menyadari bahwa perbedaan itu mustahil dihilangkan, tetapi mereka dapat dipersatukan oleh kesadaran memiliki wilayah tempat tinggal yang sama; oleh sentimen yang sama melalui ikatan sejarah, jaringan budaya, dan persaudaraan; dan penerimaan pada sebuah bahasa yang disepakati sebagai bahasa persatuan. Dengan kesadaran itulah, seperti telah disinggung tadi, lahir sebuah deklarasi penting yang membayangkan sebuah tanah air, bangsa, dan bahasa sebagai alat persatuannya. Deklarasi itulah yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 berikut ini:

Pertama:

³ Etnisitas adalah kelompok masyarakat yang (merasa) memiliki kesamaan sejarah, nenek moyang, asal usul dan bahasa yang sama, sebagaimana tercermin dalam simbol-simbol yang khas, seperti agama, pakaian, dan tradisi. Berdasarkan adanya sejumlah unsur budaya yang sama, satu kelompok masyarakat etnik secara budaya berbeda dari kelompok masyarakat yang lain. (*International Encyclopedia of Social Science*, Vol. 3). Sebagai konsep, etnisitas mengacu pada pembentukan dan pelanggaran batas-batas kultural dan punya keunggulan dalam penekanannya pada sejarah, budaya dan bahasa (Obed Bima Wicandra, “Graffiti di Indonesia: Sebuah Politik Identitas ataukah Tren? (Kajian Politik Identitas pada Bomber di Surabaya)” *Jurnal Nimana*, Vol. 8, No. 2, Juli 2006: 53.

¹Stuart Hall “Introduction: Who Needs Identity?” dalam Stuart Hall & Paul du Gay (ed.), *Questions of Cultural Identity*. London: Sage Publications, 1996.

² Benedict R.O’G Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso, 1986.

Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.

Kedua:

Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Ketiga:

Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Dalam lampiran keputusan kongres itu dijelaskan, bahwa keputusan tersebut berdasarkan "... keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, yaitu Kemauan, Sejarah, Hukum Adat, serta Pendidikan dan Kepanduan."⁴ Muhammad Yamin, salah seorang pemrakarsa dan perumus teks Sumpah Pemuda, dalam pidatonya yang bertajuk "Bangsa dan Kebangsaan"⁵ mengungkapkan dasar pemikirannya tentang ketiga butir yang tertera dalam teks Sumpah Pemuda, berikut ini: "Kesadarannya dalam merumuskan Indonesia dilandasi oleh tiga faktor penting, yaitu (1) Indonesia sebagai Tanah Air yang secara geografis tercakup dan wujud sebagai wilayah Nusantara; (2) Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai sejarah panjang keagungan raja-raja; dan (3) Indonesia yang terdiri dari berbagai sukubangsa, etnis, agama, dan bahasa yang mendiami pulau-pulau besar dan kecil yang dipersatukan oleh kesadaran menggunakan bahasa yang sama sebagai alat komunikasi."⁶

Mengenai butir ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi: "*Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia,*" bermakna bahwa bahasa Indonesia yang ditempatkan berada di atas bahasa-bahasa daerah lain yang hidup dan berkembang di wilayah budaya etnik di seluruh pelosok Nusantara, tidak berarti hendak menyingkirkan bahasa-bahasa daerah itu.

⁴ Dalam notula penjelasan tentang ketiga butir Sumpah Pemuda itu, ada keterangan bahwa dasar pemikiran tentang ketiga butir Sumpah Pemuda dengan mempertimbangkan faktor *kemauan, sedjarah, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan*. Kemauan (bersama) adalah kemerdekaan; sejarah (yang sama) adalah latar belakang Indonesia dengan kebesaran masa lalu raja-raja Nusantara dan kesadaran pentingnya persatuan; hukum adat adalah penghormatan pada kultur dan bahasa etnik; pendidikan adalah usaha memajukan pendidikan bagi bangsa bumiputra; dan kepanduan adalah kesadaran pentingnya kepeloporan para pemuda (Indonesia) berada di garis terdepan dalam mencapai cita-cita (kemerdekaan).

⁵ Dibacakan pada Kerapatan Besar Indonesia Moeda yang Pertama, di Surakarta, 29 Desember—2 Januari 1931.

⁶ Pitut Soeharto dan A. Zainoel Ihsan, *Permata Terbenam*, Jakarta: Aksara Jayasakti, 1981, hlm. 251—282.

Pernyataan "... *menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia*" tidak hanya sebagai bentuk pengakuan akan keberadaan bahasa-bahasa daerah, melainkan juga klaim atau semacam rekomendasi bahwa bahasa-bahasa daerah itu, mesti dipertahankan keberadaannya dan kosa katanya dijadikan kekayaan untuk meningkatkan jumlah kosa kata bahasa Indonesia.⁷

Sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia menunjukkan, bahwa kekayaan sumber-sumber alam, laut, hutan, hasil pertanian, dan eksotisme panorama keindahan alamnya, telah mendorong bangsa-bangsa asing datang ke kepulauan Nusantara. Bangsa Eropa kemudian menyebut wilayah itu sebagai *Mooi Indië*,⁸ kepulauan Hindia yang indah. Bukan cuma itu, inklusivisme penduduk di wilayah Nusantara itu, juga menjadi pertimbangan bangsa-bangsa asing itu datang ke Nusantara. Maka, seperti telah disebutkan di awal, penduduk Nusantara, juga dikenal sebagai masyarakat yang terbuka menerima apa pun sejauh memberi manfaat. Harap diingat, semua yang diterima itu tidak begitu saja ditelan bulat mentah, tetapi diolah lagi sesuai asas manfaat dan kepentingan masyarakat, dikemas lagi agar tidak ada resistensi. Singkatnya: semua yang datang dari bangsa-bangsa asing itu, diterima dan seketika itu pula dinusantarakan.

Penusantaran agama, budaya, bahasa, atau apa pun yang datang dari luar itu, memang sudah terjadi sejak awal. Faktor penusantaran pengaruh bangsa-bangsa asing itulah yang menjadikan penduduk di Nusantara pernah begitu reputasional.⁹

⁷ Dalam Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, 25—28 Juni 1938, masalah hubungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, disampaikan juga oleh Ki Hadjar Dewantara yang dikatakannya, "... bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang diwajibkan tidak berarti mendesak bahasa daerah" Sementara M. Tabrani mengatakan, "Bahasa Indonesia bukan lawan bahasa daerah." Lihat Harimurti Kridalaksana (Ed.), *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 241, 251.

⁸ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Jakarta: Gramedia, 1996, hlm. 43.

⁹ Sekitar lima abad lamanya (abad ke-14 sampai abad ke-19) Nusantara pernah menjadi pusat peradaban dan jaringan intelektual poros Nusantara—Timur Tengah dan Asia Barat dengan bahasa Melayu dan Arab sebagai bahasa komunikasi. Di berbagai daerah, muncul pula para ulama dan intelektual yang ribuan karya filsafat, sastra, bahasa, sejarah, antropologi, dan seterusnya. Beberapa di antaranya, dapat disebutkan di sini: Nur al-Din al-Raniri dan Abd. Al-Rauf al-Sinkili, Hamzah Fansuri dan Syams al-Din al-Samatrani (Aceh), Muhammad Yusuf al-Maqassari (Makassar), Arsyad al-Banjari (Banjarmasin), Al-

Sebab, segalanya diterima, diolah, dikemas, dan disajikan kembali secara kreatif. Tambahan pula, sebelum bangsa-bangsa asing datang ke wilayah Nusantara, penduduk setempat sudah mempunyai modal budaya—meminjam istilah Bourdieu, yaitu aksara (huruf),¹⁰ bahasa, dan tradisi sastra yang melimpah. Penduduk di wilayah Nusantara itu juga entah sejak kapan sudah dikenal sebagai bangsa religius yang berpangkal dari sistem kepercayaan animisme.

Masuknya agama Hindu yang dibawa para gujarat India diterima begitu saja yang kemudian melahirkan kerajaan-kerajaan Hindu. Penerimaan Hinduisme itu, terutama karena ajaran Hindu sejalan dengan sistem kepercayaan animisme yang sudah tumbuh subur dalam masyarakat Nusantara. Maka ajaran Hindu mudah diintegrasikan dengan sistem kepercayaan yang sudah ada. Jadilah para penghuni pohon, batu besar, hutan belantara, gunung atau laut yang tadinya disebut roh nenek moyang, kini berganti menjadi para dewa. Inilah gelombang pertama bangsa asing yang berhasil menyebarkan pengaruhnya begitu kuat dan luas di Nusantara. Itulah sebabnya, Hinduisme menjadi salah satu akar kebudayaan Indonesia. Jejaknya sampai kini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, apa pun agama yang dianutnya.

Setelah itu, datang pula para pendeta Buddha menyebarkan agamanya. Kerajaan Sriwijaya tahun 686 Masehi pernah menjadi pusat agama Buddha terbesar di Asia. Itulah gelombang kedua masuknya kebudayaan India. Kali ini yang datang adalah para rahib, pendeta, dan intelektual. Mereka ada yang diundang, ada juga yang datang sendiri dan memperkenalkan ajaran Buddha. Dari sanalah penduduk di beberapa wilayah Nusantara mengenal Buddhisme. Mereka menerima Buddhisme, namun

Palimbani (Palembang), Sultan Ageng Tirtayasa (Banten), bahkan sampai Dawud bin Abd. Allah di Patani. Periksa V.I. Braginsky, *Yang Indah, Berfaedah dan Kamal: Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 7—19*, Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1998, Teuku Iskanda, *Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad*, Jakarta: Libra, 1996; dan Edi Sedyawati, dkk. *Sastra Melayu Lintas Daerah*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2004.

¹⁰ Suku-suku bangsa di Indonesia yang mempunyai aksara sendiri, antara lain, Aceh, Bali, Batak, Bima, Cirebon, Jawa, Kerinci, Lampung, Rejang, Sunda. Ada juga aksara-aksara yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi terdapat dalam prasasti-prasasti, yaitu aksara Palawa, Sansekerta, dan Kawi. Adapun aksara Jawi, Pegon, atau Arab gundul, yaitu bahasa Melayu atau bahasa daerah yang memakai huruf Arab, sampai sekarang masih digunakan masyarakat.

tidak menghilangkan begitu saja Hinduisme. Buddha dan Hindu dapat berkembang bersama tanpa menimbulkan konflik.¹¹

Masuknya agama Hindu dan Buddha ke wilayah Nusantara, tidak berarti nilai-nilai sistem kepercayaan animisme ditinggalkan. Sistem kepercayaan itu tetap dipertahankan, meskipun penduduknya beragama Hindu atau Buddha. Itulah sebabnya, menjelang keruntuhan kerajaan-kerajaan Hindu di pulau Jawa, masuknya agama Islam, yang dibawa para pedagang Timur Tengah, diterima penduduk dengan tetap mempertahankan nilai-nilai sistem kepercayaan yang sudah ada, yaitu animisme, Hindu, dan Buddha. Itulah gelombang ketiga masuknya bangsa asing memperkenalkan agama baru, yaitu Islam. Agama Islam dibawa para gujarat India dan para penyebar agama dari Magribi. Seperti juga penerimaan Hindu dan Buddha, Islam diterima tanpa melalui konflik dan peperangan, juga tanpa menghilangkan anasir-anasir Hindu¹² dan Buddha. Bahkan, kepercayaan animisme bisa menyusup di tengah ritual upacara tradisi.¹³

Gelombang keempat datang dari bangsa Asia Timur, terutama China. Sistem kepercayaan Konfusianisme yang lebih dikenal dengan Konghuchu, menjadi bagian penting bagi kelompok masyarakat Tionghoa. Meskipun pada zaman Orde

¹¹ Sebagai bukti bagaimana hubungan dua agama itu berlangsung tanpa konflik, datang saja ke Candi Borobudur dan pelajari relief yang terdapat di dinding candi itu. Kita akan menemukan kisah Ramayana yang berasal dari tradisi Hindu. Borobudur dan beberapa candi lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur dibangun oleh raja yang menganut agama Hindu. Tetapi kini candi itu dan beberapa candi lainnya digunakan untuk upacara keagamaan umat Buddha.

¹² Islam yang diajarkan Sunan Kalijaga, salah satunya, disampaikan melalui kesenian. Sunan Kalijaga memanfaatkan gamelan dan wayang (peninggalan Hindu) untuk menyebarkan agama Islam. Oleh karena itu, dalam beberapa upacara keagamaan (Islam), jejak Hindu ini masih tampak dengan jelas, seperti misalnya, pembakaran kemenyan, dupa, dan sesajen berupa bunga-bunga. Dalam naskah-naskah awal zaman Islam, penyebutan *dewata-alla* banyak kita jumpai di sana. Sebuah surat kabar, *Bintang Djohar* (terbit pertama kali, 11 Januari 1873) yang dikelola para misionaris Kristen, selain menyebut Tuhan Allah, Tuhan Jesus, juga Allah *ta alla*.

¹³ Penduduk beragama Islam di beberapa daerah sampai sekarang masih ada yang beranggapan, bahwa benda-benda alam (pohon, gunung, atau batu besar) dihuni oleh makhluk halus. Oleh karena itu, benda-benda alam itu harus dihormati dan diberi sesajen (makanan dan bunga-bunga), agar tak mengganggu ketenteraman warga masyarakat. Periksa juga ritual pesta laut yang diselenggarakan para nelayan di Banyuwangi, Cirebon, Cilacap, atau di beberapa daerah pesisir atau upacara panen raya sebagai ucapan rasa syukur kepada Dewi Sri, Sang Dewi Padi.

Baru, sistem kepercayaan ini tidak diakui sebagai agama, kelompok masyarakat Tionghoa masih tetap menjalankan sistem kepercayaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid mengakui keberadaan Konghuchu dan dinyatakan sebagai salah satu agama resmi di Indonesia, kelompok masyarakat etnik ini seperti berlomba-lomba menyumbangkan peranannya dalam ikut memperkaya kebudayaan Indonesia.¹⁴ Meskipun demikian, tidak sedikit pula masyarakat kita yang tetap bersiteguh pada sistem kepercayaan yang paling awal atau kepercayaan sebagai sinkretisme atau penggabungan dengan tradisi setempat. Para penganutnya disebut penghayat aliran kepercayaan. Pada 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, bahwa negara mengizinkan atau membolehkan aliran kepercayaan tercantum secara eksplisit pada kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP). Menurut data Kemendikbud 2017, ada sekitar 187 aliran kepercayaan yang tersebar di 13 provinsi di Tanah Air. Bukankah mereka secara historis, sosiologis, kultural, dan faktual adalah bagian inheren dan tidak terpisahkan dari Indonesia.

Itulah empat pilar sistem kepercayaan, yaitu animisme, Hindu, Buddha, dan Islam yang membentuk kebudayaan Indonesia.¹⁵

¹⁴ Kelenteng Sam Pho Kong di Semarang adalah salah satu kelenteng terbesar di Asia Tenggara. Setiap tahun, pada setiap hari raya Imlek, para penganut Kong Hun Chu dari seluruh dunia datang ke kelenteng itu. Kota Singkawang di Kalimantan Barat yang mayoritas penduduknya beragama Buddha (47 %), Konghuchu (10 %) dan Islam (22%) mengklaim sebagai kota seribu kuil. Pada hari raya Imlek dan Capgomeh, orang-orang Tionghoa dari seluruh dunia datang ke kota itu untuk merayakan hari raya umat Konghuchu itu bersama orang-orang Melayu yang beragama Islam, dan orang Dayak yang menganut kepercayaan animisme. Pada upacara itu, dihadirkan pula para tatung dengan segala kekuatan supranaturalnya.

¹⁵ Berbeda dengan penerimaan agama Hindu, Buddha, dan Islam, penerimaan agama Kristen (Protestan dan Katolik) pada mulanya di beberapa daerah mendapat resistensi atau penolakan, karena Kristen diperkenalkan oleh bangsa Belanda yang dianggap sebagai kolonial. Meski begitu, di Sumatera Utara dan Manado, misalnya, Protestan diterima secara baik-baik saja, tanpa resistensi. Penerimaan pengaruh kebudayaan Barat, pada awalnya terjadi melalui perubahan penggunaan huruf Arab-Melayu dengan huruf Latin yang lalu diikuti dengan pengenalan mesin cetak. Dari sana merambat pada gaya hidup orang Barat yang diperlihatkan bangsa Belanda serta melalui sistem pendidikan dan pemerintahan kolonial Belanda. Lebih lengkap, lihat Maman S. Mahayana, "Permasalahan Kebudayaan dan Tantangannya di Indonesia," Makalah *Expert Meeting* Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 13 April 2016.

Masuknya bangsa-bangsa Eropa (Portugis, Inggris, dan terutama Belanda), juga meninggalkan begitu banyak unsur budaya yang kemudian diterima begitu saja sebagai kebudayaan Indonesia. Inilah gelombang kelima kedatangan bangsa asing yang ikut mewarnai kebudayaan Indonesia. Agama Kristen diterima sebagai salah satu sistem kepercayaan yang dianut sebagian bangsa Indonesia. Sesudah Indonesia merdeka, Kristen (Protestan dan Katolik) diakui negara sebagai agama resmi bersama dengan agama Islam, Hindu, dan Buddha.

Sistem kepercayaan, produk budaya, ekspresi bahasa, dan penyikapan masyarakat –atau bangsa—pada apa pun yang datang dari luar itu, berlangsung baik-baik saja. Semua diterima seolah-olah segala unsur dan pengaruh asing yang dianggap baik itu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada resistensi. Tidak ada protes. Inklusivisme dan penyikapan masyarakat yang baik-baik saja itu, tampak juga dalam bahasa Indonesia yang menyerap begitu banyak serapan bahasa asing. Maka, kalimat berikut ini pun, diterima begitu saja, seolah-olah semua kosa kata yang membentuknya asli berasal dari bahasa Indonesia (: Melayu).

Menurut kalkulasi primbon Jawa dan perhitungan feng shui, pada hari Minggu nanti, kursi, meja, dan komputer itu, seyogianya diletakkan menghadap jendela tanpa kaca, agar sirkulasi udara dari arah taman dapat menerobos masuk ruangan.

Pertanyaannya: berapa banyak kosa kata bahasa Melayu –sebagai asal dan dasar bahasa Indonesia—yang terdapat dalam kalimat itu? Semua kata yang dicetak miring dalam kalimat itu bukan berasal dari bahasa Melayu. Di sana, ada serapan dari bahasa Jawa (*menurut, primbon, menerobos*), Inggris (*kalkulasi, sirkulasi*), Minangkabau (*diletakkan*), Kawi (*menghadap, masuk*), Prancis (*komputer*), Portugis (*Minggu, meja, jendela, kaca*), Cina (*feng shui*), Arab (*kursi*), Sanskerta (*tanpa, seyogianya, Jawa*), dan Parsi (*hari, agar, arah, taman*).

Inklusivisme yang menjadikan bangsa ini mudah menerima apa pun yang dianggap baik. Penyikapan mereka yang baik-baik saja, dalam istilah yang agak berbau politis, disebut toleransi. Nah, bangsa Indonesia sejak awalnya memang dikenal sebagai bangsa yang penuh toleransi. Sejauh dipandang baik dan tidak mengarahkan pada kerusuhan, semua akan disikapi dan diperlakukan secara baik. Perbedaan adalah keniscayaan. Jadi, sungguh mengherankan jika terjadi kerusuhan SARA hanya lantaran perbedaan kepercayaan, ideologi,

atau sikap budaya.

Begitulah, dalam hal sistem kepercayaan yang kemudian jadi sikap budaya, penduduk di wilayah Nusantara ini —seperti sudah disebutkan—sudah dikenal sebagai bangsa yang inklusif, toleran, menerima secara baik apa pun yang datang dari luar yang dianggap baik, tanpa perlu menumpas, membuang atau melenyapkan sistem kepercayaan yang sudah ada dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Segalanya dinusantarakan. Dalam kehidupan modern sekarang ini, kita dengan mudah dapat melihat jejak akulturasi itu. Tak perlu heran, jika menjelang Ramadhan atau pada saat hari raya Lebaran (Iedul Fitri) sejumlah besar umat Islam datang ke kuburan leluhur atau kerabat keluarga, berziarah di sana, sambil menaburkan bunga-bunga dan air doa.

Berbeda dengan masuknya bangsa-bangsa Asia (terutama India, Arab, dan China) ke wilayah Nusantara yang tanpa bermaksud melakukan penjajahan, kedatangan bangsa Eropa, khususnya Belanda, datang dengan semangat menjajah. Nusantara hendak dijadikan sebagai wilayah koloninya.

Setelah *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) datang pada tahun 1596 dan menguasai perdagangan di wilayah Nusantara, konflik beberapa kerajaan dan kesultanan pribumi dengan bangsa asing (khususnya Belanda) mulai sering terjadi. Pertanyaannya: mengapa kedatangan gujarat dan para pepadat India serta bangsa Asia Timur, diterima tanpa konflik, sementara kedatangan Belanda justru malah menimbulkan konflik berkepanjangan?

Itulah yang membedakan kedatangan bangsa Timur (Arab, India dan China) dan bangsa Barat (Belanda). Bangsa Indonesia akan menerima bangsa mana pun, tanpa sikap permusuhan, jika bangsa itu datang dengan semangat persahabatan—persaudaraan. Belanda datang justru dengan semangat menguasai, semangat menjajah. Maka, bangsa Indonesia akan menolak dan berusaha mengusirnya dari wilayah Nusantara. Hal itu pula yang terjadi pada kedatangan bala tentara Jepang (Dai Nippon), Maret 1942. Pada awalnya, penduduk Indonesia menerima bala tentara Jepang sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Dalam perkembangannya, ternyata bala tentara Jepang berusaha melakukan pendudukan dan menciptakan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia pun melakukan perlawanan dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.

Demikianlah gambaran selintasan perjalanan

panjang pembentukan pilar kebudayaan Indonesia yang berkaitan dengan identitas keindonesiaan dan toleransi pada perbedaan dan keberbagaian. Penerimaan bangsa kita pada sistem kepercayaan yang dibawa bangsa asing, sebagiannya dikemas sebagai ritual, sebagiannya lagi sebagai ekspresi budaya.

Pertanyaan kini: mengapa bangsa yang sejak lama dikenal begitu toleran, punya sejarah yang membanggakan, ada alat perekat keanekaragaman kultur etnik, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan punya kekayaan budaya yang berlimpah, belakangan ini seperti surut ke belakang, tergusur oleh derasnya kultur asing yang membawa film dan sinetron. Pemakaian bahasa asing, terutama Inggris untuk nama-nama kompleks perumahan mewah, hotel, toko, mal, dan seterusnya, seperti menegaskan ketergusuran posisi bahasa Indonesia. Setidak-tidaknya, kebanggaan itu tampak makin luntur manakala budaya asing menerjang masuk tak terkendali.¹⁶ Bagaimana penyikapan bangsa kita pada kebudayaan Indonesia yang sumbernya berasal dari kultur etnik dalam menghadapi derasnya pengaruh globalisasi dan desakan masuknya kebudayaan asing? Bagaimana segala keanekaragaman kebudayaan etnik sebagai kekayaan bangsa Indonesia menjadi benteng utama yang dapat menumbuhkan kebanggaan nasional? Bagaimana penguatan sentimen kebangsaan perlu dilakukan dalam menghadapi berbagai masalah itu? Itulah beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama.

Ada dua fondasi yang dapat digunakan untuk mengembalikan kebesaran peradaban bangsa Indonesia sebagai usaha penguatan nilai kebangsaan, yaitu menumbuhkan kebanggaan (1) pada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa nasional, dan bahasa persatuan dan (2) pada keberagaman bangsa Indonesia dengan segala tradisi dan kultur etniknya yang eksotik, khas, dan mempesona. Tujuannya: (1) menegaskan kembali identitas keindonesiaan yang tidak dapat melepaskan

¹⁶ Rasa hormat yang berlebihan pada orang asing—dengan menempatkan gaji pekerja asing lebih tinggi daripada orang Indonesia sendiri, derasnya sinetron asing masuk dan nyaris menguasai industri hiburan televisi, dan meluasnya pemakaian bahasa Indon-English sebagai nama toko, kafe, hotel, kawasan perumahan dengan nama-nama jalannya, produk kosmetik, dan seterusnya, menunjukkan tiadanya penghargaan pada bahasa sendiri, bahkan juga dapat dianggap sebagai pelecehan terhadap bahasa negara. Asumsi bahwa bahasa Indonesia “tidak punya nilai jual, tak komersial” merupakan representasi dari bentuk pelecehan terhadap bahasa negara.

diri dari latar belakang budaya etnisitas, sekaligus menanamkan kesadaran, bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara, bahasa nasional, dan bahasa persatuan yang masih terus dalam proses menjadi. Sangat mungkin suatu saat bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN, atau bahkan bahasa resmi antarbangsa. (2) Kebanggaan sebagai bangsa yang multi-etnik dengan segala kekayaan tradisi budayanya, akan menumbuhkan semangat saling menghormati. Keanekaragaman etnik atau suku bangsa itu, tidak lain adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Jika leluhur bangsa ini telah menunjukkan jiwa besar mereka dengan terus-menerus memelihara kerukunan dan toleransi, maka sungguh mengherankan apabila kini persoalan itu, justru terkoyak lantaran kepentingan politik sesaat.

Kesusastraan Indonesia secara kultural pada hakikatnya adalah kesusastraan 'etnik'. Penggunaan bahasa Indonesia yang menempatkannya sebagai sastra Indonesia, bahasa nasional yang diangkat dari bahasa etnik Melayu. Sebagai sastra yang ruhnya berasal dari kultur etnik, ia tak terlepas dari berbagai hal yang melingkarinya. Bagaimanapun, penciptaan karya sastra tidak datang dari kekosongan. Tidak dibawa para malaikat dari langit. Sastra lahir dari berbagai problem sosio-kultural, ideologi, dan seterusnya yang menjadi kegelisahan sastrawan. Boleh dikatakan, sastrawan langsung atau tidak, merefleksikan latar belakang sosio-budaya dan ideologi yang melahirkan dan membesarkannya.

Sekadar contoh, sebut saja misalnya novel-novel awal Balai Pustaka. Sebagian besar tokoh utama dalam novel terbitan Balai Pustaka, tidak pernah lepas dari semangat pengelanaan (merantau). "Konsep merantau menurut alam pikiran Minangkabau ialah untuk menimba segala sesuatu yang tidak mereka dapati di alam tradisional. Perantauan adalah sumber dari sesuatu yang baru"¹⁷ Bukankah gambaran perantauan tokoh-tokoh dalam novel itu merupakan representasi kultur Minangkabau?

Ketika Sutan Takdir Alisjahbana menyatakan, bahwa kebudayaan tradisional (: kultur etnik) – sebagai masa lalu—yang harus mati semati-matinya, dalam kenyataannya, pernyataan itu sekadar slogan belaka. Majalah *Poedjangga Baroe* yang dikelolanya, justru banyak pula memuat berbagai tulisan yang mengangkat kebudayaan tradisional (kultur etnik)

¹⁷ A.A. Navis, "Benang Merah Minangkabau dalam Karya Sastera Asrul Sani," *Asrul Sani 70 Tahun* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1977), hlm. 131.

atau kesusastraan yang berorientasi pada unsur kedaerahan.¹⁸ Jadi, meskipun Alisjahbana menganjurkan agar bangsa Indonesia berorientasi ke Barat, ia sendiri tidak menolak dan membiarkan orang berbicara tentang berbagai pemikiran yang berkaitan dengan kebudayaan tradisional (: kebudayaan daerah). Dari sejumlah artikel yang dimuat majalah *Poedjangga Baroe*, kita memperoleh gambaran, bahwa kaum terpelajar kita, seperti Hussen Djajadiningrat, Armijn Pane, Amir Hamzah, menyadari benar, bahwa kebudayaan etnik yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara merupakan sumber inspirasi para sastrawan kita dalam melahirkan karya-karyanya.

Persoalan itu pula yang terjadi pada seniman dan budayawan Gelanggang yang memproklamasikan sikap berkeseniannya lewat Surat Kepercayaan Gelanggang. Dari sejumlah besar sastrawan Gelanggang, Chairil Anwar yang tegas mengatakan, bahwa Pujangga Baru sebenarnya tidak memberikan apa-apa bagi kebudayaan Indonesia. Meskipun begitu, Chairil Anwar menerjemahkan semangat Barat untuk kepentingan kreativitasnya. Maka, seperti dikatakan Sutardji Calzoum Bachri, "Ambillah Barat dan kebudayaan Indonesia baru akan menjadi kreatif sesuai dengan tuntutan zaman."¹⁹

Selain Chairil Anwar, di sana masih ada Asrul Sani, Sitor Situmorang, Pramoedya Ananta Toer, Achdiat Karta Mihardja, Rivai Apin, dan sederetan nama lain yang juga tidak dapat melepaskan diri dari kebudayaan etnik yang melahirkan dan membesarkannya. Maka, kita dapat melihat, pernyataan "melap-lap kebudayaan lama" justru telah diterjemahkan dalam sejumlah karya mereka sebagai penggalian pada sumber tradisi (: etnik). Asrul Sani ternyata masih mencintai Sang Mamak ("Surat dari Ibu") dan melakukan pengelanaannya dalam semangat Minangkabau. Pramoedya Ananta Toer (*Bukan Pasar Malam*) menguak secara kritis

¹⁸Periksa artikel Poerwoto Prawirahardjo, "Kesoesteraan Indonesia Djawa" (*Poedjangga Baroe*, No. 6, November 1933) yang mengangkat perjalanan kesusastraan Jawa berikut para pujangganya. Bersamaan dengan artikel itu, dimuat pula tulisan Hoesein Djajadiningrat, "Arti Pantoen Melajoe jang Gaib" yang menolak pandangan orang-orang Barat tentang pantun. Dalam artikel Armijn Pane, "Kesoesteraan Baroe" (*Poedjangga Baroe*, No. 1—6, Djoeli – Desember 1933) ditegaskan pula bahwa pengaruh kebudayaan daerah tidak dapat diabaikan begitu saja dalam kesusastraan baru. Sejumlah puisi yang ditulis Imam Soepardi, Tatengkeng, Amir Hamzah, A. Tisna, dan beberapa penulis lain, memperlihatkan juga pengaruh kebudayaan etnik.

¹⁹ Sutardji Calzoum Bachri, "Chairil," J.B. Kristanto (Ed.), *100 Tahun Nusantara* (Jakarta: Kompas, 2000), hlm. 536.

feodalisme Jawa, sementara dalam *Keluarga Gerilya*, Pram menegaskan pentingnya berkorban demi Tanah Air. Sitor Situmorang mengusung eksistensialisme dalam kegamangan berhadapan dengan Batak sebagai kultur leluhurnya, dan Achdiat Karta Mihardja membongkar tarekat dalam sebagian masyarakat Sunda berhadapan dengan rasionalitas agama.

Sejak tahun 1950-an, semangat mengangkat kebudayaan etnik, tidak lagi terpusat pada Minangkabau (: Sumatra),²⁰ tetapi makin menyebar ke dalam diri para sastrawan yang berlatar etnis lain, seperti Jawa, Bali, Dayak, Melayu, dan seterusnya. Keadaan itu terus berkembang ketika ada usaha untuk melakukan semacam revitalisasi tradisi dalam kemasan modern. Itulah yang terjadi dalam perjalanan kesusastraan Indonesia tahun 1970-an,²¹ dan terus berlanjut—meski tidak lebih semarak dibandingkan dasawarsa itu—sampai kini. Timbul pertanyaan: mengapa masalah kultur etnik jarang disinggung oleh para pengamat sastra Indonesia?

Ada dua kemungkinan yang melatarbelakangi hal tersebut. Pertama, terjebak oleh cara pandang kolonial, sebagaimana yang diterapkan pada Balai Pustaka.²² Cara pandang kolonial itu pula yang menempatkan sastra sebagai produk elit,²³ dan menciptakan dikotomi roman Balai Pustaka dan roman picisan (: bacaan liar).²⁴ Secara lebih luas, ada pula dikotomi sastra lama—tradisional dan sastra

baru—modern.²⁵ Kedua, terkungkung oleh cara pandang strukturalis.²⁶ Dalam dua dasawarsa lebih, pendekatan struktural mendominasi pengajaran sastra di berbagai peringkat pendidikan. Akibatnya, karya sastra yang sesungguhnya menyimpan kekayaan kultur etnik, tidak dapat lebih jauh dimaknai, ditafsirkan, dan dikaitkan dengan kekayaan budaya yang berada di belakang teks. Bukankah para sastrawan Indonesia lahir dan besar dalam lingkaran kebudayaan etnik?

Mengingat kesusastraan Indonesia secara kultural merupakan kesusastraan 'etnik' maka usaha mempelajarinya, langsung atau tidak langsung, dapat digunakan sebagai pintu masuk memperkenalkan kekayaan kultur etnik yang lain. Dengan demikian, pelajaran sastra di sekolah mestinya tidak lagi diperlakukan sebagai pengetahuan teoretis, melainkan sebagai bentuk apresiasi terhadap khazanah kesusastraan Indonesia sendiri dan sekaligus sebagai usaha memperkenalkan kultur etnik dengan berbagai fenomenanya. Lebih jauh lagi, pelajaran sastra—termasuk juga berbagai penelitian sastra Indonesia, diharapkan sampai ke sebuah muara yang bernama Indonesia yang pluralis, yang multietnik, yang multikultural. Oleh karena itu, mempelajari sastra Indonesia yang berdarah-daging etnis, dapat dianggap sebagai usaha memahami kebudayaan Indonesia yang beragam dan sekaligus sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadapnya.

Menempatkan kesusastraan Indonesia sebagai pintu masuk menuju pemahaman pluralitas budaya dan keberagaman etnik masyarakat di wilayah Nusantara ini, tentu saja bukan tanpa alasan. Selain sebagai usaha penanaman nilai-nilai karakter membangun kebanggaan pada kultur keindonesiaan, juga untuk memperkokoh semangat persatuan dan

²⁰ Keadaan itu dimungkinkan karena Balai Pustaka tidak lagi menerapkan sensor. Di samping itu, munculnya sastrawan dari berbagai daerah non-Sumatra telah memudahkan dominasi sastrawan Sumatra.

²¹ Sastrawan-sastrawan yang muncul pada dasawarsa ini kemudian dikenal dengan nama Angkatan 70-an. Slogan penting yang menjadi landasan berkeseniannya adalah "Kembali ke akar, kembali ke tradisi." Satu pernyataan yang secara eksplisit hendak mengusung kultur etnik.

²² Sejak awal berdirinya Balai Pustaka, lembaga itu telah menerapkan sensor yang ketat atas naskah-naskah yang akan diterbitkan. Nota Rinkes (1910) menyebutkan tiga syarat: (1) tidak mengandung unsur antipemerintah kolonial, (2) tidak menyinggung perasaan dan etika golongan masyarakat tertentu, (3) tidak menyinggung suatu perasaa agama tertentu. Dalam bahasa Orde Baru, kebijaksanaan itu, tercakup dalam pernyataan: dilarang menyinggung masalah SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan).

²³ Kenyataan, sastra (Balai Pustaka) memang dihasilkan oleh beberapa gelintir kaum elite dan dibaca, juga hanya oleh kalangan elite (kaum terpelajar).

²⁴ Salah satu alasan politik berdirinya Balai Pustaka adalah untuk membendung pengaruh buku-buku terbitan swasta yang dikatakannya sebagai bacaan liar produk "saudagar kitab yang tidak suci hatinya." Dengan cap sebagai bacaan liar, maka buku-buku terbitan swasta diperlakukan dengan konotasi buruk.

²⁵ Secara tersirat dua buku A. Teeuw, yaitu (1) *Sastra Baru Indonesia* (Ende: Nusa Indah, 1980) dan (2) *Sastra Indonesia Modern II* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989) mengisyaratkan adanya garis demarkasi antara sastra Indonesia—lama—tradisional dan sastra Indonesia baru—modern. Memang, kedua buku itu membicarakan sastra Indonesia pasca-Balai Pustaka. Dengan begitu mengesankan, bahwa sastra Indonesia (baru—modern) dimulai dari zaman Balai Pustaka. Pandangan ini menafikan khazanah sastra Indonesia yang terbit (1) di luar Balai Pustaka (2) di media massa (suratkabar dan majalah). Kedua buku A. Teeuw itu juga sekaligus menegaskan cara pandang yang ahistoris. Seolah-olah sastra Indonesia tanpa tradisi yang melatarbelakanginya. Seolah-olah lagi, sastra Indonesia lahir akibat pengaruh sastra Belanda (Barat).

²⁶ Kajian terhadap karya sastra yang semata-mata bertumpu pada struktur karya yang bersangkutan (unsur intrinsik), dan tidak dibenarkan menghubungkaitkannya dengan faktor di luar struktur (ekstrinsik).

kebanggaan nasional. Oleh karena itu, kinilah saatnya memanfaatkan khazanah kesusastraan Indonesia yang sarat bernafaskan kultur etnik untuk dijadikan salah satu alat atau kendaraan yang akan membawa bangsa ini menuju pemahaman keberagaman etnik dengan pluralitas budayanya.

Dengan mempertimbangkan tiga faktor berikut ini, tidaklah berlebihan jika gagasan ini dicobakan.

Pertama, pluralitas kultural yang dimiliki suku-suku bangsa di wilayah Nusantara ini merupakan lahan yang tak bakal habis digali dan dimanfaatkan bagi pemerayaan khazanah sastra Indonesia. Periksa saja karya-karya yang dihasilkan sastrawan kita yang mengalami kegelisahan kultural atas budaya etniknya.²⁷

Kedua, diberlakukannya otonomi daerah makin melebarkan peluang bagi sastrawan daerah untuk melakukan eksplorasi kekayaan budaya suku bangsanya sendiri. Tentu saja kondisi itu bakal meramaikan konstelasi kesusastraan Indonesia melalui eksplorasi dan penggalian berbagai budaya etnik. Pada gilirannya, makin mempertegas keanekaragaman budaya dan pluralitas yang melekat dalam diri sastrawan Indonesia.

Ketiga, kurikulum di sekolah perlu memasukkan khazanah sastra lisan, cerita rakyat, pantun, syair, lagu dolanan, dan seterusnya, yang sebenarnya merupakan kekayaan yang berlimpah dari tradisi kesusastraan Nusantara.²⁸

²⁷ Sekadar menyebut beberapa, misalnya, periksa novel Chairul Harun, *Warisan* (1979), Darman Munir, *Bako* (1983) dan *Dendang* (1990), Wisran Hadi, *Orang-Orang Blanti* (2000), dan Gus tf Sakai, *Tambo: Sebuah Pertemuan* (2000) yang merepresentasikan kultur Minangkabau; karya Arswendo Atmowiloto, *Canting* (1986), Ahmad Tohari, *Ronggeng Dukuh Paruk* (1982), Umar Kayam, *Para Priyayi* (1992), Kuntowijoyo, *Pasar* (1994). Dari kultur Melayu dapat disebutkan karya Ediruslan Pe Amanriza, *Dikalahkan Sang Sapurba* (2000), Taufik Ikram Jamil, *Hempasan Gelombang* (1999) dan *Gelombang Sunyi* (2001). Dari kultur Madura dapat kita cermati dari sejumlah antologi puisi D. Zawawi Imron, *Bantalku Ombak Selimutku Angin* (1996; II, 2000), dari kultur Dayak, pilihan jatuh pada novel *Upacara* (1978) karya Korrie Layun Rampan, dan dari kultur Papua (Asmat), *Namaku Tewateraut* (2001), Aning Sekarningsih, *Isinga* (Dorothea Rosa Herliani (2015). Dari kultur Bali, *Bila Malam Bertambah Malam* (1971; II, 2003) karya Putu Wijaya dan *Tarian Bumi* (2000) karya Oka Rusmini. Tentu saja masih banyak nama dan karya lain yang belum disebut yang memperlihatkan kuatnya kegelisahan kultural yang dihadapi pengarangnya.

²⁸ Jika kita menelusuri perjalanan sastra Indonesia ke belakang, maka sesungguhnya ada benang merah yang menghubungkan cerita pandak ke cerita pendek; hikayat ke novel; dan syair dan pantun ke puisi Indonesia. Kedua buku A. Teeuw yang

Dengan dasar pemikiran itu, kiranya perlu dipertimbangkan semacam pendidikan atau pelajaran mengenai berbagai kebudayaan etnis dengan memanfaatkan khazanah kesusastraan Indonesia sebagai jembatannya, di dalamnya termasuk khazanah sastra klasik dan cerita rakyat yang bertebaran di berbagai daerah di Nusantara ini. Dengan memperkenalkan kekayaan tradisi khazanah sastra Indonesia diharapkan ada kesadaran, bahwa bangsa Indonesia, jauh sebelum bangsa Eropa datang, telah mempunyai tradisi baca-tulis yang menunjukkan sebuah peradaban yang tinggi dan reputasional.

disebutkan tadi, lalu dua buku Zuber Usman (*Sastra Indonesia Lama dan Sastra Indonesia Baru*), Ajip Rosidi (*Kapankah Kesusastraan Indonesia Lahir?*), H.B. Jassin (*Kesusastraan Indonesia dalam Kritik dan Esay 1—4*) telah memutuskan perjalanan tradisi sastra Indonesia seolah-olah bermula tahun 1900-an atau bertepatan dengan berdirinya Balai Pustaka (1908). Jadi jelas, semua buku yang disebutkan itu cenderung ahistoris.